



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KINERJA (LKj) INSTANSI PEMERINTAHAN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 tahun 2020, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur, Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan 12 program dengan 3 (tiga) sasaran strategis sehingga laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2024 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2024-2026. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tanjung Pandan, 17 Februari 2025


KEPALA DINAS,
EDI USDianto, ST.
Pembina Utama Muda
NIP.197505182001121004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi.....	2
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	11
1.4 Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	21
3.2 Perbaikan SAKIP Tahun 2024	48
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	51
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024.....	62
4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025.....	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	12
Tabel 2.1	Target Kinerja dan Indikator Tahun 2024-2026.....	16
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja 2024.....	19
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2	Ringkasan Kinerja Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024	22
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an.....	24
Tabel 3.4	Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2024	24
Tabel 3.5	Target, Ralisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	27
Tabel 3.6	Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kab. Belitung Tahun 2024	34
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	41
Tabel 3.8	Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024	42
Tabel 3.9	Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman	43
Tabel 3.10	Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2024	47
Tabel 3.11	Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP	49
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU	51
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program	52
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 Menurut Kegiatan / Sub Kegiatan	53
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Anggaran	57
Tabel 3.16	Kinerja Sumber Daya Manusia	58



Tabel 3.17	Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	59
Tabel 3.18	Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung	60



DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung	4
Gambar 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024	29
Gambar 3.2 Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air	31
Gambar 3.3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2024	33
Gambar 3.4 Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi	34
Gambar 3.5 Pengambilan Sampling Air	35
Gambar 3.6 Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung	35
Gambar 3.7 Kegiatan UPT PAM Tahun 2024	36
Gambar 3.8 Kegiatan Pembangunan SPALD Tahun 2024.....	38
Gambar 3.9 Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2024.....	39
Gambar 3.10 Kegiatan Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Perumahan	46
Grafik 3.1 Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kab. Belitung	59
Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi PAD	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas PUPR antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan permukiman. Dari output pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masa transisi, dimana perencanaan pembangunan yang dipakai adalah RPD Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024-2026. Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 73,827 Milyar untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman. Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan pemenuhan PSU permukiman. Hal tersebut didukung melalui pelaksanaan 12 program, 23 kegiatan serta 61 sub kegiatan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman dengan realisasi 45,35% dan Kinerja 100,02%;
2. Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an, dengan realisasi 25,57% dan kinerja 97,71%;
3. Pemenuhan PSU Permukiman, dengan realisasi 65,14% dan kinerja 100,96%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan OPD serta seluruh personil dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja serta adanya dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Adapun faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang terbatas dengan banyaknya kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kabupaten Belitung serta terkait dengan infrastruktur ke-PU-an yang tidak mendapatkan anggaran seperti pembangunan jalan menuju jalan standar yang merupakan salah satu faktor untuk pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Untuk rencana ke depan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui komitmen baik dalam perencanaan pelaksanaan dan monitoring pekerjaan serta kiranya Pemerintah Kabupaten Belitung dapat menganggarkan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. secara umum bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, menilai pelaksanaan program unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap penerapan sistem guna peningkatan kinerja organisasi. Dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pasal 21 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan oleh kepala OPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah .

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut disusun dokumen perencanaan Lima tahunan (Renstra) dan Tahunan (Renja), sebagai upaya memenuhi Standar Pelayanan yang diamanatkan, ataupun target Kinerja yang harus diukur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan secara periodik, dijabarkan dalam dokumen perencanaan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan instansi pemerintah harus akuntabel, sistematis, terukur dan berkesinambungan. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila organisasi memiliki suatu sistem perencanaan yang baik, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana kerja tahunan, penyusunan dan penetapan anggaran sampai pada pengukuran pencapaian kinerja.

1.1 Tugas dan Fungsi

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas serta fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah

Fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;

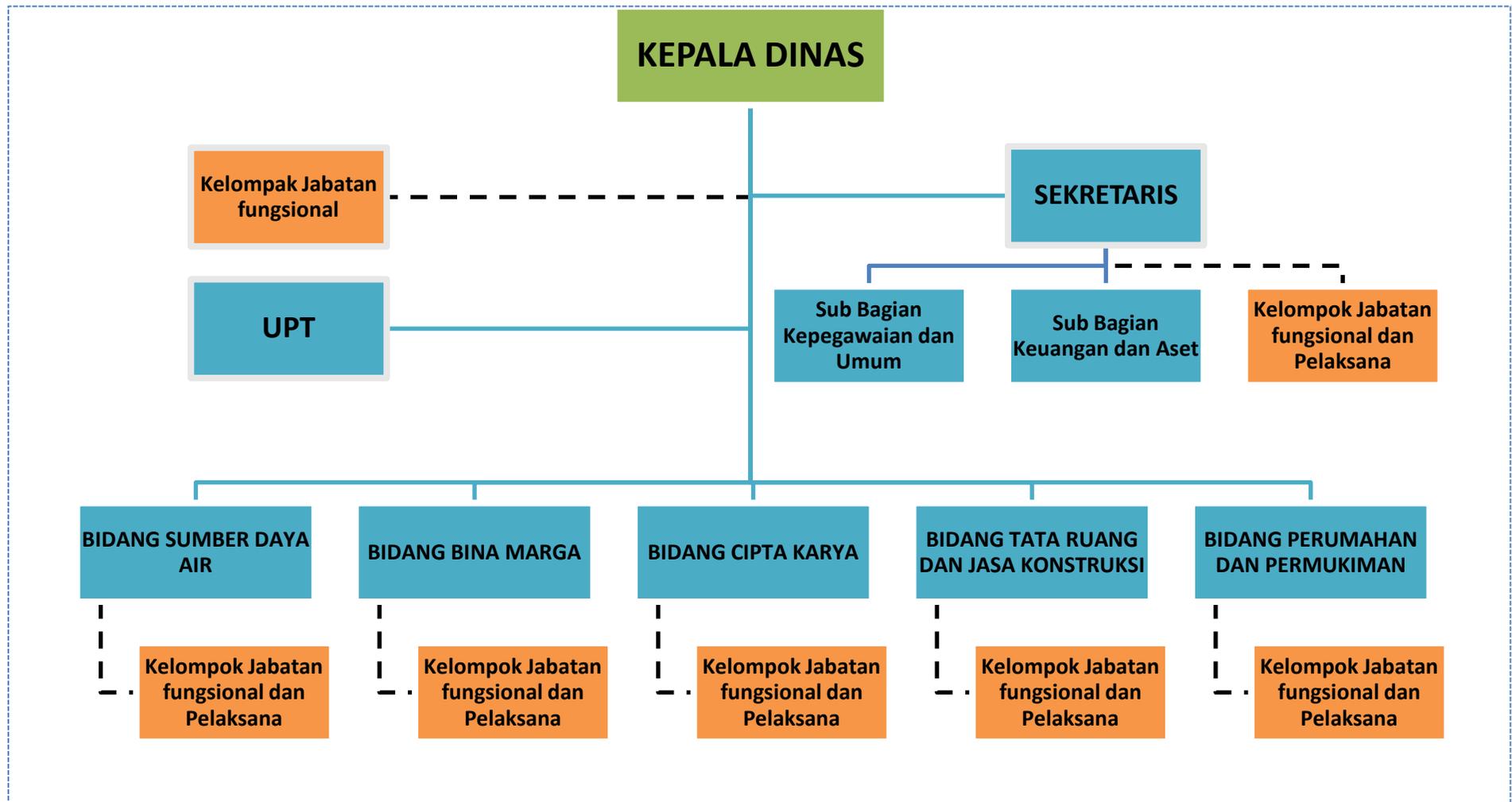
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;



- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang bina marga;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
- c. Pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;



- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. Pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;

- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai 2 (dua) UPT yaitu:

- a. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium
UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM)
UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT PAM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT PAM;
 - b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana prasarana pendukungnya;



- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit PAM yang di distribusikan kepada para pelanggan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT PAM;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis merupakan hasil analisis terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Hasil telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR.



Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung
Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas Perumahan dan Permukiman • Kurangnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman • Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Rendahnya sarana dan prasarana air limbah • Belum optimalnya pengelolaan air minum/air bersih • Kurangnya sarana dan prasarana air minum • Kurangnya sarana dan prasarana drainase lingkungan • Belum optimalnya penanganan Kawasan Kumuh • Belum optimalnya Forum P2KP
2	kurangnya infrastruktur kewilayahan	kurangnya aksesibilitas antara wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan • Kurangnya basis data informasi tata ruang • Masih rendahnya informasi tata ruang • Belum optimalnya program Simtaru • Kurangnya kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan • Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan • Belum optimalnya pengelolaan jalan • Masih terdapat jalan yang belum memiliki status
		Kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, adalah sebagai berikut:



- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air
- b. Pemenuhan Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi
- c. Mengoptimalkan pelayanan jalan kabupaten
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung
- e. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi
- f. Mengoptimalkan Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum optimal
- g. Pencegahan terhadap berkembangnya kawasan kumuh perkotaan

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Tugas dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Perbaikan SAKIP Tahun 2024
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan



BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung difokus pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisiensi dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan serta kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung.

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang.

Adapun sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an.
- b. Meningkatnya infrastruktur permukiman.

2.1.2. Target Kinerja dan Indikator

Adapun Target Kinerja dan Indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Target Kinerja dan Indikator Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang		Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman	45,34 %	46,55 %	47,96 %
	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	26,17 %	27,57 %	29,36 %
	Meningkatnya infrastruktur permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52 %	65,54 %	66,56 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PUPR kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 2.2)

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		
Sasaran RPD	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang	Meningkatnya infrastruktur kePUan	1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan air baku irigasi,	1. Meningkatkan Sumber air baku yang terlindungi baik sumber air baku untuk irigasi, kebutuhan domestik (rumah tangga) dan industri

sesuai dengan tata ruang	kebutuhan domestik dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Pendataan sumber air baku dengan skala prioritas 3. meningkatkan pengendalian sumber daya air dan penanganan banjir 4. Meningkatkan pengamanan pantai dan pemeliharaan alur sungai kewenangan kabupaten 5. Meningkatkan jaringan irigasi
	2. Pemenuhan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum 2. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah 3. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan
	3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan standar jalan kabupaten 2. mempertahankan kinerja jalan mantap kabupaten 3. peningkatan jalan non-status menjadi jalan kabupaten
	4. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang dan wilayah strategis kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan PERDA tata ruang, membuat RDTR, dan peraturan zonasi Wilayah Kabupaten 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	5. Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan PBG 2. Meningkatkan Penataan Bangunan dan lingkungan
	6. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dasar jasa konstruksi tingkat kabupaten 2. Meningkatkan mutu konstruksi



	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	1. Meningkatkan prasaranan dan sarana umum kawasan permukiman	1. Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman dan perumahan 2. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau/pertamanan
		2. Penanganan dan Pencegahan kawasan kumuh	1. Pengurangan kawasan kumuh 2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 3. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dimana Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan Bupati sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan Infrastruktur kePUan dan Permukiman	46,34 %
2	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur kePUan	26,17 %
3	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2025

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.106.001.641,00	APBD/APBD-P
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350,00	APBD/DIF/APBD-P
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000,00	APBD/DIF/APBD-P
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	694.710.000,00	APBD
5	Program Penataan Bangunan Gedung	13.474.485.000,00	APBD/DABA/APBD-P
6	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	755.219.400,00	APBD/APBD-P
7	Program Pengembangan Perumahan	83.946.803,00	APBD
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000,00	APBD/DIF
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.375.683.650,00	APBD/DIF/APBD-P
10	Program Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598,00	APBD/DIF/DBH/APBD-P
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.210.442.886,00	APBD/DIF/APBD-P
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000,00	APBD
	Total	73.827.217.328,00	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta mengungkapkan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria penilaian realisasi kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



1. Ringkasan Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Ringkasan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an dan permukiman	Persen	45,34	45,35	100,02	tercapai
2	Meningkatnya infrastruktur kePUan	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	Persen	26,17	25,57	97,71	Belum tercapai
3	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU permukiman	Persen	64,52	65,14	100,96	Tercapai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2025

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang yang dijabarkan dalam indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 45,35% telah mencapai target. Untuk kinerja atas sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 25,57% belum mencapai target sementara untuk kinerja sasaran strategis meningkatnya infratsruktur permukiman dengan indikator kinerja pemenuhan PSU permukiman, menunjukkan indikator kinerja sebesar 65,14% telah mencapai target.

Adapun pencapaian sasaran strategis **terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang** diperoleh dari rumus :

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman = $(0,5 \times \text{Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an}) + (0,5 \times \text{Pemenuhan PSU Permukiman})$

Capaian sasaran strategis **terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang** dengan indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dengan Anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output sasaran sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sasaran. Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi kinerja sasaran strategis **terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sasaran strategis sebesar 100,02%, lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 90,55%.

Capaian sasaran strategis **meningkatnya infrastruktur permukiman** dengan indikator pemenuhan PSU permukiman dengan Anggaran sebesar Rp. 7.068.447.453,- atau 9,57% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,-. Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi kinerja sasaran strategis **meningkatnya infrastruktur permukiman** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sasaran strategis sebesar 100,96%, lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 96,34%.

Capaian sasaran strategis **meningkatnya infrastruktur ke-PU-an** dengan indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dengan Anggaran sebesar Rp. 66.758.769.875,- atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,-. Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi kinerja sasaran strategis **terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sasaran strategis sebesar 97,71%, lebih besar dari pada capaian penggunaan anggaran sebesar 89,94%.

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2024 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam menjalankan fungsi utamanya untuk urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan permukiman rakyat pada pemerintah diuraikan dibawah ini.

2.1 Sasaran Strategis/IKU 1 : Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

No.	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	Persen	26,17	25,57	97,71	Belum tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Sasaran startegis ini merupakan sasaran startegis untuk urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut :

2.1.1 Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an

Target kinerja pada tahun 2024 untuk indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an sebesar 26,17%.

Pada Tahun 2024, indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an yang terealisasi sebesar 25,57% atau mencapai 97,71% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada table 3.4 berikut :

Table 3.4 Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	26,17	25,57

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan capaian sebesar 25,57% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an = (0,25 x jalan standar kabupaten) + (0,25 x rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman) + (0,25 x rumah dengan layanan SPALD) + (0,25 x sumber daya air yang dikelola dengan baik)

Keterangan :

- a. Persentase jalan standar = (Panjang jalan Standar kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%
- b. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman = (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman/Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung) x 100%
- c. Persentase rumah dengan layanan SPALD = (Jumlah rumah dengan SPALD/Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung) x 100%
- d. Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik = (0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur).

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2024 adalah sebesar **25,57%**. Tingkat capaian kinerja sebesar **97,71%**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase Jalan Standar didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan standar kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$$
$$\frac{183,18}{666,02} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar **27,50%** dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar **183,18 km** dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu **666,02 km** dikali seratus persen.

- b. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman didapat dengan menggunakan rumus
- $$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$



$$\frac{11.431}{61.297} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar **18,65 %** dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar **11.431 rumah tangga** dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu **61.297 rumah tangga** dikali seratus persen.

- c. Persentase rumah dengan layanan SPALD didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah rumah dengan SPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.935}{38.153} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar **7,69 %** dengan perhitungan jumlah rumah dengan SPALD sebesar **2.935 rumah** dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu **38.153 rumah** dikali seratus persen.

- d. Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik didapat dengan menggunakan rumus

(0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur +
 (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur)

$$= (0,4 * 55,72\%) + (0,6 * 43,58\%)$$

$$= 48,44\%$$

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar **48,44%** dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.



Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) program utama yaitu program pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah serta 4 (empat) program pendukung yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, program pengembangan jasa konstruksi dan program penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026 sehingga tidak bias dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian
Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Standar Kabupaten	28,25 %	27,50 %	97,35	belum tercapai
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	49,91 %	48,44 %	97,05	belum tercapai
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	18,30 %	18,65 %	101,91	tercapai
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik	8,20 %	7,69 %	93,78	belum tercapai
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	22,00 %	21,54 %	97,91	belum tercapai

6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar	4,79 %	4,58 %	95,62	belum tercapai
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00 %	60,00 %	100,00	tercapai
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00 %	92,09 %	92,09	belum tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Standar Kabupaten sebesar **97,35%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **28,25%** pada tahun 2024 terealisasi sebesar **27,50%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja program ini adalah Kurangnya dukungan anggaran untuk pencapaian kinerja. Untuk kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten pada tahun 2024 lebih banyak untuk kegitan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.

Capaian sasaran **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator persentase jalan standar kabupaten didukung dengan dana sebesar Rp. 31.029.143.598,- atau 42,03% dari anggaran sebesar 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,35%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 89,87%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota sebesar 100,00% telah mencapai target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota didukung dengan dana sebesar Rp. 31.029.143.598,- atau 42,03% dari anggaran sebesar 73.827.217.328,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 7 (tujuh) atau 100% dari rencana sebanyak 7 (tujuh) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,35%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 89,87%.

Gambar 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024



Dilihat dari **Tabel 3.5.**, realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar **48,44%** dari target sebesar **49,91%** dengan realisasi kinerja sebesar **97,05%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2024 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** dengan indikator persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik didukung dengan dana sebesar Rp. 2.210.442.886,- atau 2,99% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,05%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 93,91%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang dikelola sebesar 97,29% kurang dari target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 1.431.480.807,- atau 64,76% dari anggaran program sebesar Rp. 2.210.442.886,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) atau 100% dari rencana sebanyak 3 (tiga) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,29%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 90,69%.

Rata-rata capaian sasaran **kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang dikelola sebesar 100,00% telah mencapai dari



target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 778.962.079,- atau 35,24% dari anggaran program sebesar Rp. 2.210.442.886,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,81%.

Gambar 3.2 Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air



Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang **375 Sambungan Rumah (SR)** selama tahun 2024 sehingga terdapat penambahan sekitar **521 Rumah Tangga** yang terlayani air minum yang layak.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman didukung dengan dana sebesar Rp.5.118.737.350,- atau 6,93% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 101,91%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,16%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** sebesar 100% sama dari target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. 5.118.737.350,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 5.118.737.350,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) atau 100% dari rencana sebanyak 3 (tiga) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,16%.

Gambar 3.3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM
Tahun 2024



Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan.

Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2024.

Tabel 3.6 Jumlah Pelanggan Aktif
UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	SPAM Juru Seberang	108
2	SPAM IKK Sijuk	332
3	SPAM IKK Membalong	199
4	SPAM Desa Bantan	249
5	SPAM IKK Badau	257
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	25
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	92
9	SPAM Kws. Tanjung batu	272
10	SPAM IKK Selat Nasik	350
	Jumlah	1952

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2025

Gambar 3.4 Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi



Gambar 3.5 Pengambilan Sampling Air



Gambar 3.6 Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung



Gambar 3.7 Kegiatan UPT PAM Tahun 2024



Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Akan tetapi untuk sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dianggarkan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi yang berakibat pada kinerja Program yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Selain itu untuk tahun 2023 tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) air limbah sehingga tidak ada pembangunan baru untuk SPALD.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan indikator Persentase Jumlah Rumah dengan sistem Pengolahan limbah Domestik didukung dengan dana sebesar Rp.1.051.260.000,- atau 1,42% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 93,78%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,90%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota** sebesar 100% sama dari target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp.1.051.260.000,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp.1.051.260.000,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Kabupaten/ Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,90%.

Gambar 3.8 Kegiatan Pembangunan SPALD Tahun 2024



Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan. Pada Tahun 2024 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 1.046 meter.

Capaian sasaran Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan indikator Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik didukung dengan dana sebesar Rp.694.710.000,- atau 0,94% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,91%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,84%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** sebesar 19,37% sama dari target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp.694.710.000,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp.694.710.000,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,84%.

Gambar 3.9 Kegiatan Pengembangan Sistem Darinase Tahun 2024



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Koordinasi

dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 318.770.000,- atau 0,43% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) atau 100% dari rencana sebanyak 4 (empat) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 92,09%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 61,18%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- 2) Melakukan kordinasi dengan OPD lain, PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung serta BPIW Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.
- 5) Mengoptimalkan layanan informasi tata ruang melalui aplikasi digital (Simtaru)
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan jasa konstruksi

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- 1) Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk lokasi dimaksud sudah dilaksnakan oleh pihak lain yaitu BPIW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Tidak adanya anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- 1) Agar Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan yang menjadi IKU-nya OPD sehingga target kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai
- 2) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- 3) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 4) Melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja
- 6) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja serta Balai dalam pemenuhan infrastruktur yang tidak teralokasikan oleh Pemerintah Daerah

2.2 Sasaran Strategis/IKU 2 : Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

No.	Sasaran Strategis /IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen 64,52	65,14	100,96	tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Sasaran startegis ini merupakan sasaran startegis untuk urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman.



Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut :

2.2.1 Pemenuhan PSU Permukiman

Target kinerja pada tahun 2024 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 64,52%.

Pada Tahun 2024, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 65,14% atau mencapai 100,96% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada table 3.5 berikut:

Table 3.8 Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 65,14% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%;
- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2024 adalah sebesar 65,14% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,96%, dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase jalan lingkungan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

- b. Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- c. RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- d. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,80 %	99,93 %	100,13	tercapai
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66,02 %	48,42 %	73,34	belum tercapai
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang	100,00 %	0,00 %	0,00	belum tercapai



		Mendapat Rumah Layak Huni				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai tingkat capaian kinerja 100,13% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni, dimana untuk tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) unit rumah rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Capaian sasaran Program **Perumahan dan kawasan Pemukiman Kumuh** didukung dengan anggaran sebesar Rp. 608.817.000,- atau 0,82% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Perumahan dan kawasan Pemukiman Kumuh** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,39%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** sebesar 100% lebih besar target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** didukung dengan dana sebesar Rp. 608.817.000,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 608.817.000,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,39%.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 73,34% yaitu dari target sebesar 66,02% yang terealisasi sebesar 48,42%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang



direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Capaian sasaran Program **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** didukung dengan dana sebesar Rp.6.375.683.650,- atau 8,64% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 73,34%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,32%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** sebesar 100,00% sama dengan target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** didukung dengan dana sebesar Rp. 6.375.683.650,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 6.375.683.650,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,32%.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem pelayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2024 tidak terjadi bencana.

Capaian sasaran Program **Pengembangan Perumahan** didukung dengan dana sebesar Rp.83.946.803,- atau 0,11% dari anggaran sebesar Rp. 73.827.217.328,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengembangan Perumahan** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini

dilihat dari capaian output program sebesar 0,00%, sama dengan capaian penggunaan dana sebesar 0,00%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** sebesar 0% lebih kecil target tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp.83.946.803,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp.83.946.803,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 0,00%, sama dengan capaian penggunaan dana sebesar 0,00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.
- 4) Melakukan upaya skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sector dan OPD.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.

- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 4) Mengoptimalkan peran website dalam penyerapan aduan masyarakat terhadap pemenuhan infrastruktur.

Table 3.10 Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Realisasi			
		Output			
		Panjang	Satuan	Lebar Rata-rata	Satuan
1	Program Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	258,0	M	1,2 s.d 2,5	M
	1 a. Gang Rambutan, Kampung damai	118,0	M		M
	2 b. RT04/RT05 Perbatasan (Jalan Kik Bujang)	140,0	M		M
2	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	249,0	M	1,0 s.d 2,0	M
	3 a. Gang Depan Kantor Pos, Jl. Merdeka	200,0	M		M
	4 b. Gang Kelinci, Kel. Kota	49,0	M		M
3	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Parit	339,0	M	1,2 s.d 2,2	M
	5 a. Jalan Veteran Lingkungan RT 03 (Dekat Nafisa)	123,0	M		M
	6 b. Jalan Depan Toko Mas Hero	216,0	M		M
4	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	419,0	M	3,0	M
	7 a. Jalan Muallim Dalam	419,0	M		M
5	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Paket 1 (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	890,0	M	3,0	M
	8 a. Jalan Peternakan	310,0	M		M
	9 b. Jalan Lingkar Dusun	580,0	M		M
6	- Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani P2IP/Haryani (Lanjutan)	100,0	M	4,0	M
	10 a. Jalan Handayani P2IP/Haryani	100,0	M		M
7	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan	1.725,8	M	3,0 s.d 4,0	M
	11 a. Jalan Kenanga	177,0	M		M
	12 b. Gang Duren	96,0	M		M
	13 c. Jalan Berlian	371,0	M		M
	14 d. Jalan Jerat Nangka	481,0	M		M
	15 e. Jalan Muallim Dalam	148,8	M		M
	16 f. Jalan Bina Insani	452,0	M		M
8	- Peningkatan jalan Lingkungan Kecamatan Sijuk	879,0	M	3,0 s.d 4,0	M
	17 a. Jalan Padat Karya	265,0	M		M
	18 b. Jalan Kik Janggau	292,0	M		M
	19 c. Jalan Aik Dulang (Pesantren Putra)	322,0	M		M
	Jumlah	4.859,8	M		
	Total Panjang Jalan Lingkungan	4.013,8	M		
	Total Panjang Jalan Setapak	846,0	M		

Sumber : Bidang Perkim Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



Gambar 3.10 Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman



3.2. Perbaikan SAKIP Tahun 2024

Kinerja lainnya pada tahun 2024 adalah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung nomor 700.1.2.1/104/RLKin/INSPEK/2024 tanggal 28 Agustus 2024. Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 67,50 dengan kategori B yaitu Baik.

Nilai yang diperoleh pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Nilai yang diperoleh pada tahun 2022. Untuk Evaluasi AKIP lebih menitikberatkan pada implementasi AKIP secara mandiri sebelum dinilai oleh evaluator

yaitu Inspektorat Kabupaten Belitung dengan disertai dengan *evidence* untuk mendukung penilaian AKIP.

Table 3.11 Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP

No.	Komponen	Hasil Evaluasi Tahun 2022			Hasil Evaluasi Tahun 2023		
		Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	72,00%	21,60	30,00	69,00%	20,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	67,00%	20,10	30,00	61,00%	18,30
3	PElaporan Kinerja	15,00	67,00%	10,05	15,00	75,00%	11,25
4	Evaluasi Internal	25,00	59,00%	14,75	25,00	69,00%	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	66,50%	66,50	100,00	67,50%	67,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B			B

Sumber : LHP Evaluasi AKIP Inspektorat, 2024

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Belitung untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk:

- a. Melakukan perbaikan pada penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan mempedomani PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/*cascading* dan *crosscutting* kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- b. Mencantumkan target kinerja atas sasaran strategis pada dokumen rencana aksi secara periodik (per-triwulan) untuk mempermudah melakukan pemantaua/pengukuran pencapaian target kinerja strategis secara berkala/periodik;
- c. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada Website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
- d. Membuat Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal dan memanfaatkan system teknologi berupa aplikasi atas pengukuran data kinerja;
- e. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan mendalam yaitu pengukuran capaian kinerja atas PK eselon III, IV serta bawahnya dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja dengan penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran;
- f. Melakukan proses supervise secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan kinerja dan informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan;

- g. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan informasi yang memadai pada Laporan Kinerja BAB III Akuntabilitas kinerja yaitu informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- h. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk penentuan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- i. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- j. Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui usulan Diklat/bimtek/sosialisasi terkait Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam hal tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penjenjangan kinerja akan disusun dengan mempedomani PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021 serta Perbup Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemkab Belitung, akan tetapi perlu dilakukan sosialisasi maupun bimtek khusus mengenai tatacara Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penyajian yang disampaikan semua OPD telah memenuhi kesamaan pemahaman terhadap bentuk penyajiannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sudah menyusun baik itu perjanjian kinerja mulai dari eselon II sampai dengan fungsional/pelaksana, *cascading*, pohon kinerja;
- b. Akan mencantumkan target kinerja atas sasaran strategis pada dokumen rencana aksi secara periodik (per-triwulan);
- c. Akan mempublikasikan hasil dari perencanaan kinerja tepat waktu pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
- d. Akan Kami tindaklanjuti dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal, akan tetapi diperlukan juga bimbingan dari OPD terkait dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam penyusunan SOP sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Akan dilaksanakan pemantauan/evaluasi untuk capaian kinerja eselon III, IV serta bawahan secara periodik dalam bentuk melakukan rapat per triwulan;
- f. Akan dilakukan supervisi secara berjenjang dalam penyusunan laporan kinerja;



- g. Laporan kinerja akan disesuaikan dengan standar/ketentuan yang berlaku serta akan melakukan perbaikan terkait dengan BAB III akuntabilitas kinerja;
- h. Untuk penentuan target kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja tidak dapat dilakukan dikarenakan harus melakukan perubahan terlebih dahulu dalam dokumen perencanaannya;
- i. Untuk peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi serta menugaskan pegawai di Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk mengikuti bimtek/diklat terkait dengan penyusunan AKIP.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebesar Rp. 66.852.551.674,- atau terserap sebesar 90,55% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar 84,59%. Berikut adalah akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang dibagi kedalam beberapa kategori.

3.3.1. Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU

No.	Sasaran Startegis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	73.827.217.328	66.852.551.674	90,55
2	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	66.758.769.875	60.042.683.638	89,94
3	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	7.068.447.453	6.809.868.036	96,34

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Dilihat dari Tabel 3.12, sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman menempati urutan teratas dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar **96,34%**, sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang merupakan sasaran tertinggi kedua dengan realisasi kinerja sebesar **90,55%**, sedangkan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an menempati urutan terendah dari realisasi anggaran yaitu **89,94%**. Dari segi



anggaran, sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an mempunyai anggaran sebesar yaitu 60,04 Milyar atau sebesar **90,42%** dari total anggaran Dinas PUPR Kabupaten Belitung, hal ini disebabkan semua program yang menjadi urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk ke dalam sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an termasuk program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota.

3.3.2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	694.710.000	693.614.500	99,84
5	Program Penataan Bangunan Gedung	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37
6	Program Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598	27.886.493.473	89,87
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	755.219.400	688.060.410	91,11
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000	293.079.556	91,94
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.106.001.641	9.397.162.409	77,62%
10	Program Pengembangan Perumahan	83.946.803	-	0,00
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000	605.084.000	99,39
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32
JUMLAH		73.827.217.328	66.852.550.674	90,55

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Jika dilihat berdasarkan anggaran per program adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki capaian anggaran paling tinggi yaitu sebesar 99,90%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan capaian sebesar 99,84% serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh capaian anggaran sebesar 99,39%. Sementara untuk capaian anggaran terendah adalah Program Pengembangan Perumahan yaitu sebesar 0,00%, yang disebabkan untuk program tersebut merupakan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus selalu dianggarkan walaupun kondisi bencana alam di Kabupaten Belitung tidak ada. Untuk serapan anggaran berikutnya yang rendah adalah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 77,62% disusul oleh Program Penyelenggaraan Jalan dengan capaian sebesar 89,87%, yang disebabkan adanya sisa anggaran untuk pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jembatan, dimana bukti kepemilikan lahan yang asli belum diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024
Menurut Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.210.442.886,00	2.075.728.700,00	93,91
I.	Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.431.480.807,00	1.298.227.700,00	90,69
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Tanggul Sungai	709.196.072,00	707.905.000,00	99,82
2		Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	657.869.135,00	526.302.700,00	80
3		Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan Kabupaten/Kota	64.415.600,00	64.020.000,00	99,39
II.	Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	778.962.079,00	777.501.000,00	99,81
1	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	778.962.079,00	777.501.000,00	99,81
B	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350,00	4.973.542.490,00	97,16
I	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.118.737.350,00	4.973.542.490,00	97,16
1	Sub Kegiatan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	750.000.000,00	738.712.210,00	98,49
2		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.968.750.000,00	1.962.130.000,00	99,66
3		Operasi dan pemeliharaan SPAM	2.399.987.350,00	2.272.700.280,00	94,70
C	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000,00	1.050.259.800,00	99,90



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I.	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	1.051.260.000,00	1.050.259.800,00	99,90
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	251.260.000,00	251.208.800,00	99,98
2		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	800.000.000,00	799.051.000,00	99,88
D.	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	694.710.000,00	693.614.500,00	99,84
I.	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	694.710.000,00	693.614.500,00	99,84
1	Sub Kegiatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	385.950.000,00	385.529.500,00	99,89
2		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	308.760.000,00	308.085.000,00	99,78
E	Program	Penataan Bangunan Gedung	13.474.485.000,00	12.984.741.300,00	96,37
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.474.485.000,00	12.984.741.300,00	96,37
1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	920.655.000,00	553.905.200,00	60,16
2		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.360.000.000,00	3.347.943.000,00	99,64
3		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.066.000.000,00	8.965.293.100,00	98,89
4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	127.830.000,00	117.600.000,00	92,00
F.	Program	Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598,00	27.886.493.473,00	89,87
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	31.029.143.598,00	27.886.493.473,00	89,87
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	900.000.000,00	692.794.065,00	76,98
2		Pengelolaan leger jalan	192.219.800,00	120.649.700,00	62,77
3		Survey kondisi jalan/jembatan	500.000.000,00	494.505.000,00	98,90
4		Pemeliharaan berkala jalan	14.522.942.035,00	14.104.172.068,00	97,12
5		Pemeliharaan rutin jalan	8.213.981.763,00	8.138.959.350,00	99,09
6		Pembangunan jembatan	6.500.000.000,00	4.135.660.290,00	63,63%
7		Pemeliharaan rutin jembatan	200.000.000,00	199.753.000,00	99,88
G.	Program	Pengembangan Jasa Kontruksi	755.219.400,00	688.060.410,00	91,11
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	154.475.000,00	119.742.700,00	77,52
1	Sub Kegiatan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	154.475.000,00	119.742.700,00	77,52



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
II.	Kegiatan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	576.941.400,00	551.796.875,00	95,64
1	Sub Kegiatan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	576.941.400,00	551.796.875,00	95,64
III.	Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.803.000,00	16.520.835,00	69,41
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	23.803.000,00	16.520.835,00	69,41
H.	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000,00	293.079.556,00	91,94
I.	Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	65.000.000,00	39.768.556,00	61,18
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	28.500.000,00	11.967.235,00	41,99
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	36.500.000,00	27.801.321,00	76,17
II.	Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.541.000,00	99,77
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.541.000,00	99,77
III.	Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	49.330.000,00	49.330.000,00	100,00
1	Sub kegiatan	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	33.330.000,00	33.330.000,00	100,00
2	Sub kegiatan	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
IV.	Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
1	Sub kegiatan	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00
I.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.106.001.641	9.397.162.409,00	77,62
I.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.509.400,00	9.804.050,00	78,27
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.982.600,00	2.180.225,00	73,10
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	960.400,00	918.000,00	95,59
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	960.400,00	928.000,00	96,63
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	960.400,00	238.000,00	24,78
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.260.400,00	918.000,00	72,83
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.385.200,00	4.621.825,00	85,82
II.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.506.403.978,00	7.907.438.684,00	75,26
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.503.518.978,00	7.904.719.934,00	75,26
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.925.000,00	1.861.750,00	96,71
3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	960.000,00	857.000,00	89,27
III.	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	64.622.375,00	64,62
1	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	64.622.375,00	64,62
IV.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	896.606.563,00	848.320.665,00	94,61



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)	
			Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	13.627.300,00	97,34	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.000.000,00	151.916.650,00	99,29	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	8.887.000,00	98,74	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.525.813,00	143.762.200,00	99,47	
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.080.750,00	25.571.400,00	44,03	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	8.280.000,00	69,00	
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.000.000,00	496.276.115,00	98,08	
V.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.112.800,00	305.854.785,00	93,50	
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.900.000,00	143.741.985,00	87,17	
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000,00	26.400.000,00	99,62	
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	132.712.800,00	100,00	
VI.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.368.900,00	261.121.850,00	99,15	
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.849.100,00	45.252.600,00	96,59	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.139.800,00	121.981.250,00	99,87	
3		Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.380.000,00	38.114.000,00	99,31	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.780.000,00	99,56	
J.	Program	Pengembangan Perumahan	83.946.803,00	-	0,00	
I	Kegiatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	83.946.803,00	-	0,00	
1		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	83.946.803,00	-	0,00
K.	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000,00	605.084.000,00	99,39	
I	Kegiatan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	608.817.000,00	605.084.000,00	99,39	
1		Sub Kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	608.817.000,00	605.084.000,00	99,39
L.	Program	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.375.683.650,00	6.204.784.036,00	97,32	
I	Kegiatan	Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.375.683.650,00	6.204.784.036,00	97,32	
1		Sub Kegiatan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	98.790.000,00	98.679.000,00	99,89
2		Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.276.893.650,00	6.106.105.036,00	97,26
		TOTAL	73.827.217.328,00	66.852.550.674,00	90,55	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya

Jika membandingkan anggaran dan realisasi dengan tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	116,605,874,560	105,205,777,442	90,22%
2022	134,428,892,858	118,821,710,473	88,39%
2023	111.060.728.318	93.944.293.134	84,59%
2024	73.827.217.328	66.852.550.674	90,55%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Dari **Tabel 3.15**, dapat dilihat bahwa total realisasi anggaran selama tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebesar **90,55 %** dari total anggaran yang direncanakan yaitu Rp **73.827.217.328**.

Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Melalui LPSE baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun pengadaan barang, sehingga baik yang melalui proses pelelangan umum maupun pengadaan langsung dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan tekendalnya waktu pengadaan.
2. Harga kontrak yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.
3. Sistem pelaporan online melalui aplikasi (sipelempang, emonev) membantu proses pengendalian anggaran.
4. Adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk pencapaian kinerja OPD.

Adapun faktor penghambat adalah:

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung yang kurang maksimal. Jumlah SDM dengan jumlah program dan kegiatan tidak berbanding lurus sehingga satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan tanggung jawab diluar tugas dan fungsinya. Jika melihat pada **Tabel 3.16** Jumlah seluruh sumber daya manusia (ASN) pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah 48 (empat puluh delapan) orang sedangkan jumlah sub kegiatan sebanyak 61 Sub kegiatan. Jumlah ini membuat setiap orang yang harus menanggung beban yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini belum termasuk tugas pokok yang harus dikerjakan oleh ASN sehari-hari. Paket kegiatan yang ada di dinas PUPR

sebagian besar merupakan pengadaan jasa konstruksi dengan beban kerja yang cukup berat. Dibutuhkan skill/kemampuan sebagai pemimpin dalam manajemen proyek/konstruksi karena dalam pelaksanaan setiap jasa konstruksi memerlukan seorang Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dinas PUPR Kabupaten Belitung mengambil beberapa solusi antara lain; memanfaatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sesuai bidangnya. Kebijakan yang diambil dengan mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikasi PBJ. Selanjutnya di beberapa kegiatan konstruksi berskala besar, bidang mengambil kebijakan untuk menambah tenaga pendukung dari luar kantor. Kebijakan ini untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai spesifikasi masing-masing.

Tabel. 3.16 Kinerja Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM	Pejabat Eselon	Fungsio nal	PPPK	Jumlah Program	Jumlah Sub Kegiatan
1	Sekretariat	12	4	9	1	1	26
2	Bidang Sumber Daya Air	6	1	5	-	1	4
3	Bidang Bina Marga	4	1	3	-	1	7
4	Bidang Cipta Karya	6	1	4	1	4	10
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	7	1	7	-	4	4
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	7	1	4	-	2	5
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4	2	2	-	0	1
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2	2	0	-	0	1
	Jumlah	48	13	34	2	13	61

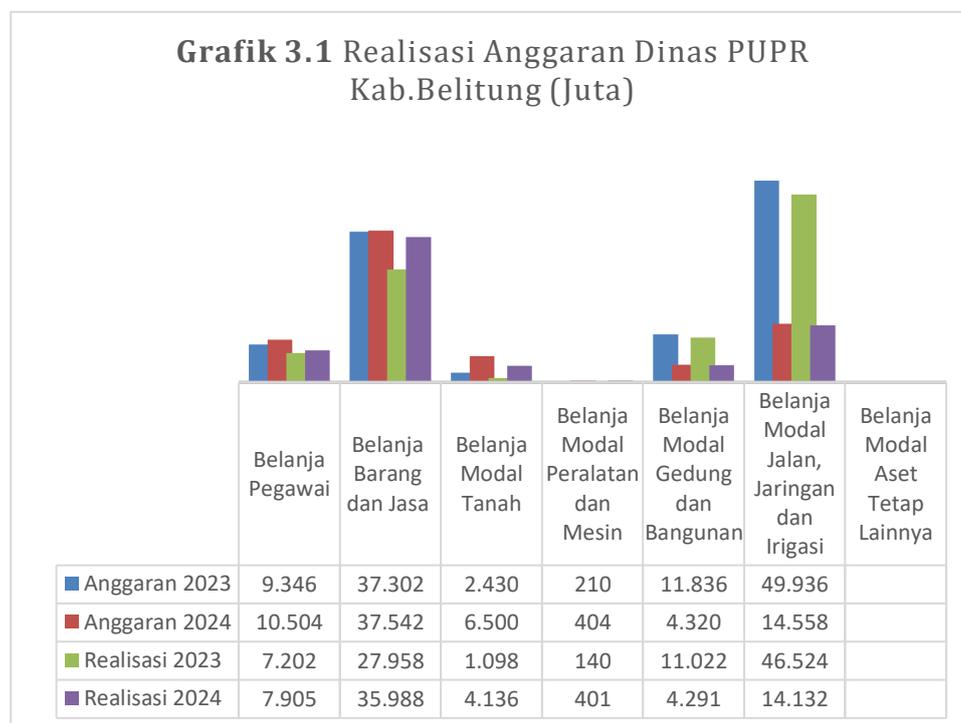
Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



Tabel 3.17 Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian	2022			2023		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
1	BELANJA OPERASIONAL	46.648.151.467	35.160.482.734	75,37	48.045.551.442	43.892.507.594	91,36
1	Belanja Pegawai	9.346.371.560	7.202.164.599	77,06	10.503.518.978	7.904.719.934	75,26
2	Belanja Barang dan Jasa	37.301.779.907	27.958.318.135	74,95	37.542.032.464	35.987.787.660	95,86
2	BELANJA MODAL	64.412.576.851	58.783.810.400	91,26	25.781.665.886	22.960.043.080	89,06
1	Belanja Modal Tanah	2.430.000.000	1.098.020.400	45,19	6.500.000.000	4.135.660.290	63,63
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.112.000	139.978.000	66,62	403.957.000	400.923.000	99,25
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.936.464.851	46.523.612.000	93,17	14.557.708.886	14.132.338.790	97,08
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.836.000.000	11.022.200.000	93,12	4.320.000.000	4.291.121.000	99,33
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-			
	Jumlah Belanja	111.060.728.318	93.944.293.134	84,59	73.827.217.328	66.852.550.674	90,55

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



Total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, akan tetapi untuk pencapaian kinerja dilihat dari sisi anggaran mengalami kenaikan.

3.3.4. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung digolongkan sebagai retribusi daerah yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas PUPR Kabupaten Belitung terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Laboratorium
2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan.

Retribusi Pemakaian Laboratorium diperoleh dari layanan UPT Sarana, Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium, sedangkan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan diperoleh dari jasa layanan penyediaan air minum oleh UPT SPAM baik melalui perpipaan, air kemasan maupun mobil tangki. Berikut realisasi pendapatan dari ketiga jenis retribusi.

Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	15.000.000	14.350.000	95,67	15.000.000	17.200.000	114,67	-		
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000	58.562.000	234,25	25.000.000	137.582.000	550,33	75.000.000	100.000.000	133,33
3	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	600.000.000	647.659.875	107,94	1.000.000.000	1.117.281.280	117,73	1.100.000.000	1.174.793.405	106,80
Total		640.000.000	615.963.700	112,59	1.040.000.000	1.272.063.280	122,31	1.175.000.000	1.274.793.405	108,49

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi PAD



Jika dilihat dari tabel 3.18, pada Tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung naik sebanyak 12,98% dibandingkan dengan target pendapatan pada Tahun 2023 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 0,22% dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan realisasi pendapatan disebabkan oleh terlampauinya target pendapatan dari semua jenis retribusi meskipun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk Retribusi Penyediaan Peta Tematik pada Peraturan yang terbaru sudah dihapus. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan diantaranya adalah:

1. Penambahan sambungan rumah (SR) baru melalui dana APBD Tahun 2024 pada UPT SPAM.
2. Berlakunya sistem aplikasi SUGAK (Sistem Utilitas Pengelolaan Air Kite) dalam pencatatan meteran, pembukuan secara online.
3. Jumlah pemohon untuk pengujian laboratorium bertambah baik dari rekanan atau penyedia Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, pihak swasta ataupun masyarakat umum yang mengajukan permohonan beberapa pengujian.
4. Pengujian laboratorium dimasukkan dalam persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Penyusunan laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Secara umum target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 telah tercapai dengan hasil yang sangat baik, dimana tingkat capaian untuk kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 97,71% yang dilihat dari sasaran startegis **Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an**. Untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tingkat capaian kinerja berada pada 100,96%, dilihat dari sasaran strateggis **Pemenuhan Infrastruktur Permukiman**. Sementara untuk capaian kinerja Sasaran Strategis **Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang** sebesar **100,02%**. Untuk penyerapan anggaran, persentase realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 90,55%.

Proses pencapaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan tercapai apabila tanpa dukungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, seperti dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah, dalam bentuk kebijakan dan anggaran, serta dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan kritik yang membangun untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Belitung. Selayaknya, dukungan dan kerja sama semua pihak harus tetap dipelihara dan dipertahankan di masa mendatang.



4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Perlu adanya bimbingan teknis/diklat oleh OPD yang mengampu dalam penyusunan LKjIP.
5. Melakukan optimalisasi kegiatan dengan keterbatasan anggaran.



SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

ESELON III

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Ringkasan Kinerja Bidang Sekretariat

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran Kegiatan pada Bidang Sekretariat sebagaimana tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Kinerja Bidang Sekretariat Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	Sasaran Kegiatan (SK) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon III	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1.1.1	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	100%
		Capaian Rata-rata SK 1			%		100%
		1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		1.2.1	Dokumen keuangan perangkat daerah	Dokumen	3	3	100%
		Capaian Rata-rata SK 1.2			%		100%
		1.3	TerselenggaranyaAd ministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		1.3.1	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkatdaerah	Orang	50	50	100%
		Capaian Rata-rata SK 1.3					100%
		1.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1.4.1	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100%

		Capaian Rata-rata SK 1.4	%			100%
	1.5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
	1.5.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	100%
		Capaian Rata-rata SK 1.5				100%
	1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
	1.6.1	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	6	6	100%
		Capaian Rata-rata SK 1.6				100%

1.1 Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" Pada Bidang Sekretariat yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Capaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata Satu indikator kinerja kegiatan yaitu Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1.1.1 Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator "Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah" diukur dengan $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 9 Dokumen Target 9 Dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan SELURUH PEGAWAI dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.804.050,00 atau 78,37% dari anggaran sebesar Rp12.509.400.

1.2 Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" Pada Bagian/Bidang Sekretariat yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Capaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu Dokumen keuangan perangkat daerah perangkat daerah.

1.2.1 Dokumen keuangan perangkat daerah perangkat

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Indikator "Dokumen keuangan perangkat daerah" Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 3 Dokumen Target 3 Dokumen

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.907.438.684,00 atau 75,26% dari anggaran sebesar Rp 10.506.403.684,00.

1.3 Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah" pada Bidang Sekretariat Yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah” tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah.

1.3.1 Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:

Indikator “Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 50 Orang Target 50 Orang

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja (Jika kinerja tercapai dengan baik):

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.622.375,00 atau 64,26% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,00.

1.4 Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah” Pada Bagian/Bidang Sekretariat yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah” tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.

1.4.1 Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:

Indikator “Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 848.320.665,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp 896.606563,00.

1.5 Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah” Pada Bidang Sekretariat yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah” tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata Sstu indikator kinerja kegiatan yaitu Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

1.5.1 Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

Indikator “Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 305.854.785,00 atau 93,50% dari anggaran sebesar Rp 327.112.800,00.

1.6 Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pencapaian sasaran kegiatan “Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah” Pada Bagian/Bidang Sekretariat yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah” tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu barang milik daerah dalam kondisi baik.

1.6.1 Barang milik daerah dalam kondisi baik

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

Indikator “Barang milik daerah dalam kondisi baik” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 6 Jenis Target 6 Jenis.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/RencanaTindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.121.850,00 atau 99,15% dari anggaran sebesar Rp 263.368.900,00.

2. Ringkasan Kinerja Bidang Sumber Daya Air

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Kinerja Bidang Sumber Daya Air Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon III	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		
2	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	2.1	Terkelolanya sumber day air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder					
		2.1.1	persentase SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola	%	100	97,29	97,29	
		Capaian Rata-rata SK 1.7						97,29
		2.2	Terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi					
		2.2.1	Persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) daerah kabupaten / kota yang dikelola dengan Baik	%	100	100	100	100
		Capaian Rata-rata SK1.8						100

2.1 Terkelolanya Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Drainase Sekunder

Pencapaian sasaran kegiatan “Terkelolanya sumber day air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder” pada Bidang Sumber Daya Air yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Capaian sasaran kegiatan “**Terkelolanya sumber daya air dan bangunan pengaman pantai, sungai dan drainase sekunder**” tahun 2024 sebesar 97,29%

dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola tercapai 97,29%

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan terkelolanya sumber daya air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder sebagai berikut:

2.1.1 Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola

Indikator “persentase SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 97,29% atau mencapai 97,29% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 97,29% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja (Jika belum/tidak tercapai atau jika tercapai tetapi masih ada kendala pada halt ertentu):

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena lokasi untuk kegiatan dimaksud sudah dilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini BIPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan terkelolanya sumber daya air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.298.227.700,00 atau 90,69% dari anggaran sebesar Rp 1.431.480.807,00.

2.2 Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi

Pencapaian sasaran kegiatan “Ter kelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi” pada Bidang Sumber Daya Air yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Ter kelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi” tahun 2024 sebesar 100% dihitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase SDA dan bangunan pengaman pantai

pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola tercapai 97,29%.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terkelolanya sumber day air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder sebagai berikut:

2.2.1 Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola dengan Baik

Indikator “Persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola dengan Baik” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan- kegiatan dilaksanakan oleh pihak lain.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran kegiatan Terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 777.501.000,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp 778.962.079,00.

3. Ringkasan Kinerja Bidang Cipta Karya

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran Kegiatan pada Bidang Cipta Karya sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Kinerja Bidang Cipta Karya Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon III		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	3.1	Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baikPengembangansistempenyediaan air minum					
		3.1.1	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	
		Capaian Rata-rata SK 1.9			%			100
		3.2	Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang terkelola dengan baik					
		3.2.1	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	%	100	100	100	
		Capaian Rata-rata SK 1.10			%			93,78%
		3.3	Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik					
		3.3.1	Panjang saluran drainase lingkungan	Meter	5400 Meter	1046 Meter	19,37%	
		Capaian Rata-rata SK 1.11			%			19,37%
		3.4	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung					
		3.4.1	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin	%	100%	100%	100%	

			mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung				
		Capaian Rata-rata SK1.12	%				100%

3.1 Terselenggaranya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dengan Baik

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baik” pada Bidang Cipta Karya yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota tercapai 100%

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebagai berikut:

3.1.1 Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator “Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota ” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100 %. Target 100 %.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.973.542.490,00 atau 97,16% dari anggaran sebesar Rp 5.118.737.350,00.

3.2 Terselenggaranya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang terkelola dengan baik” pada Bidang Cipta Karya yang

mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang terkelola dengan baik” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota

Indikator “Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100 %. Target 100 %.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota yang terkelola dengan baik yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.050.259.800,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp1.051.260.000,00.

3.3 Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik” pada Bidang Cipta Karya yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik” tahun 2024 sebesar 19,37% di hitung dari capaian rata-rata satu

indikator kinerja kegiatan yaitu panjang saluran drainase lingkungan tercapai 1.046 Meter

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik sebagai berikut:

3.3.1 Panjang saluran drainase lingkungan

Indikator “Panjang saluran drainase lingkungan” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 1.046 Meter atau mencapai 19,37% dari target 5400 Meter.

Catatan : Realisasi 1.046 Meter Target 5400 Meter

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja:

1. Tidak sinkron antara target pada dokumen perencanaan dengan target pada dokumen penganggaran dikarenakan anggaran yang tidak cukup.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu dilakukannya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 693.614.500,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp 694.710.000,00.

3.4 Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung” pada Bidang Cipta Karya yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tercapai 100%.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagai berikut:

3.4.1 Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Indikator “Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.984.741.300,00 atau 96,37% dari anggaran sebesar Rp. 13.474.485.000,00.

4. Ringkasan Kinerja Bidang Bina Marga

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran Kegiatan pada Bidang Bina Marga sebagaimana tercantum pada table 4.

Tabel 4. Ringkasan Kinerja Bidang Bina Marga Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	SasaranKegiatan (SK) /IndikatorKinerjaKegiatan (IKK) Eselon III		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	4.1	Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten				
		4.1.1	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%	100	100	100
		Capaian Rata-rata SK 4.1		%			100

4.1 Terselenggaranya Pengelolaan Jalan Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten” pada Bidang Bina Marga yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten sebagai berikut:

4.1.1 Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator “Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.886.494.473,00 atau 89,87% dari anggaran sebesar Rp. 31.029.143.598,00.

5. Ringkasan Kinerja Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran kegiatan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Kinerja Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	Sasaran Kegiatan (SK) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon III	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	5.1	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten			
		5.1.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	25	25

		Capaian Rata-rata SK 5.1	%			100
		5.2 Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten				
		5.2.1 Ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Dokumen	1	1	100
		Capaian Rata-rata SK 5.2	%			100
		5.3 Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				
		5.3.1 Laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi	Laporan	2	2	100
		Capaian Rata-rata SK 5.3	%			100
		5.4 Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten				
		5.4.1 Dokumen tata ruang	Dokumen	5	1	20
		Capaian Rata-rata SK 5.4	%			20
		5.5 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten				
		5.5.1 Dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	2	2	100
		Capaian Rata-rata SK 5.5	%			100
		5.6 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten				
		5.6.1 Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Dokumen	5	2	40
		Capaian Rata-rata SK 5.6	%			40
		5.7 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang				

		daerah kabupaten					
	5.7.1	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100	
		Capaian Rata-rata SK 5.7	%			100	

5.1 Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan ‘Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten’ pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatkan jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten sebagai berikut:

5.1.1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan

Indikator “Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 25 Orang atau mencapai 100% dari target 25 Orang.

Catatan : Realisasi 25 Orang Target 25 Orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Meningkatkan jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.742.700,00 atau 77,52% dari anggaran sebesar Rp. 154.475.000,00.

5.2 Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten” pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten sebagai berikut:

5.2.1 Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten

Indikator “Ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten” diukur dengan $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$.

Realisasi tahun 2024 adalah 1 Dokumen atau mencapai 100% dari target 1 Dokumen.

Catatan : Realisasi 1 Dokumen Target 1 Dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.520.835,00 atau 60,41% dari anggaran sebesar Rp. 23.803.000,00.

5.3 Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi” pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi” tahun 2024 sebesar 100%

di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebagai berikut:

5.3.1 Laporan Hasil Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi

Indikator “Laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 2 Laporan atau mencapai 100% dari target 2 Laporan.

Catatan : Realisasi 2 Laporan Target 2 Laporan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 551.796.875,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp 576.941.400,00.

5.4 Ditetapkannya Dokumen RTRW dan RDTR Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan ‘Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi’ pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi” tahun 2024 sebesar 20% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu dokumen tata ruang.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten sebagai berikut:

5.4.1 Dokumen Tata Ruang

Indikator “Dokumen tata ruang” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 1 Dokumen atau mencapai 20% dari target 5 Dokumen.

Catatan : Realisasi 1 Dokumen Target 5 Dokumen.

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja:

1. Tidak sinkron antara target pada dokumen perencanaan dengan target pada dokumen penganggaran dikarenakan anggaran yang tidak cukup.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu dilakukannya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.768.556,00 atau 61,18% dari anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00.

5.5 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten” pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu dokumen perencanaan tata ruang.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten sebagai berikut:

5.5.1 Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Indikator “Dokumen perencanaan tata ruang” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 2 Dokumen atau mencapai 100% dari target 2 Dokumen.

Catatan : Realisasi 2 Dokumen Target 2 Dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.541.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.

5.6 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten” pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten” tahun 2024 sebesar 40% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten sebagai berikut:

5.6.1 Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

Indikator “Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang” diukur dengan $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$.

Realisasi tahun 2024 adalah 2 Dokumen atau mencapai 40% dari target 5 Dokumen.

Catatan : Realisasi 2 Dokumen Target 5 Dokumen.

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja:

1. Tidak sinkron antara target pada dokumen perencanaan dengan target pada dokumen penganggaran dikarenakan anggaran yang tidak cukup.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu dilakukannya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terlaksananya terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.330.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 49.330.000,00.

5.7 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten” pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten sebagai berikut:

5.7.1 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator “Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 1 Dokumen atau mencapai 100% dari target 1 Dokumen.

Catatan : Realisasi 1 Dokumen Target 1 Dokumen

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.440.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 4.440.000,00.

6. Ringkasan Kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan pada setiap sasaran Kegiatan pada Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

No	Sasaran Eselon II	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon III		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	6.1	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi					
		6.1.1	Rumah layak huni bagi korban bencana	Unit	2	0	0	
		Capaian Rata-rata SK 6.1			%			0
		6.2	Rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh					
		6.2.1	Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	M2	540	240	44,44	
		Capaian Rata-rata SK 6.2			%			44,44
		6.3	Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan					
		6.3.1	Persentase penanganan PSU	%	100	100	100	
		Capaian Rata-rata SK 6.3		%			100	

6.1 Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang Dibangun dan Direhabilitasi

Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi” pada Bidang Perumahan dan Permukiman yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastruktur Permukiman” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi” tahun 2024 sebesar 0% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu rumah layak huni bagi korban bencana.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi yang dibangun dan direhabilitasi sebagai berikut:

6.1.1 Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Indikator “Rumah layak huni bagi korban bencana” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 0 Unit atau mencapai 0% dari target 2 Unit.

Catatan : Realisasi 0 Unit Target 2 Unit

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja:

1. Di Kabupaten Belitung tidak terjadi bencana alam

Capaian sasaran tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp 83.946.803,00.

6.2 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Diluar Kawasan Kumuh

Pencapaian sasaran kegiatan ‘Rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh’ pada Bidang Perumahan dan Permukiman yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastuktur Permukiman” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh” tahun 2024 sebesar 44,44% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh yang dibangun dan direhabilitasi sebagai berikut:

6.2.1 Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki

Indikator “Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki” diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 240 M2 atau mencapai 44,44% dari target 540 M2.

Catatan : Realisasi 240 M2 Target 540 M2.

Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja:

1. Tidak sinkron antara target pada dokumen perencanaan dengan target pada dokumen penganggaran dikarenakan anggaran yang tidak cukup.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu dilakukannya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 605.084.000,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp. 608.817.000,00.

6.3 Terselenggaranya Penyediaan PSU Perumahan

Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan” pada Bidang Perumahan dan Permukiman yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya infrastuktur Permukiman” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Capaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan” tahun 2024 sebesar 100% di hitung dari capaian rata-rata satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase penanganan PSU.

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan yang dibangun dan direhabilitasi sebagai berikut:

6.3.1 Persentase penanganan PSU

Indikator “Persentase penanganan PSU” Diukur dengan Realisasi / Target x 100%.

Realisasi tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target 100%.

Catatan : Realisasi 100% Target 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan kegiatan -kegiatan akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek/Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Capaian sasaran Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan yang dengan di dukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.204.784.036,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp 6.375.683.650,00

LAMPIRAN I
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	persen	100,00	100,00	100,00	10.518.913.378	7.917.242.734	75,27			
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	persen	75,00	78,67	104,89	100.000.000	64.622.375	64,62			
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.223.719.363	1.154.175.450	94,32			
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100,00	100,00	100,00	263.368.900	261.121.850	99,15			
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9,00	9,00	100,00	12.509.400	9.804.050	78,37			
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	3,00	3,00	100,00	10.506.403.978	7.907.438.684	75,26			
1.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	50,00	50,00	100,00	100.000.000	64.622.375	64,62			
1.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	896.606.563	848.320.665	94,61			
1.5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100,00	100,00	100,00	327.112.800	305.854.785	93,50			
1.6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	6,00	6,00	100,00	263.368.900	261.121.850	99,15			
Capaian Rata-Rata						100,00	12.106.001.641	9.397.162.409	77,62			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	persen	49,91	48,44	97,05	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91			
2.1	Pengelolaan SDA dan bangungamanan pantai pada wilaya (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100,00	97,29	97,29	1.431.480.807	1.298.227.700	90,69			
	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100,00	100,00	100,00	778.962.079	777.501.000	99,81			
Capaian Rata-Rata						98,65	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91			
3	Terlaksananya Pengelolaan dan ngembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	persen	18,30	18,65	101,91	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16			
3.1	Terselenggaranya sistem penyediaanair minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baik	Persentase Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16			
Capaian Rata-Rata						100,00	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Persentase Jumlah Rumah dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik	persen	8,20	7,69	93,78	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90			
	Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang dikelola dengan baik	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	persen	100,00	100,00	100,00	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90			
Capaian Rata-Rata						93,78	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90			
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	persen	22,00	21,54	97,91	694.710.000	693.614.500	99,84			
	Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan	Panjang Saluran drainase lingkungan	m	5400	1046	19,37	694.710.000	693.614.500	99,84			
Capaian Rata-Rata						19,37	694.710.000	693.614.500	99,84			
6	Tertatanya bangunan gedung dkabupaten	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar	persen	4,79	4,58	95,62	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37			
	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persen	100,00	100,00	100,00	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37			
Capaian Rata-Rata						100,00	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Meningkatnya jalan standar kabupaten	Persentase Jalan Standar Kabupaten	persen	28,25	27,50	97,35	31.029.143.598	27.886.494.473	89,87			
	Terselenggaranya pengelolaan jalan kabupaten	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	31.029.143.598	27.886.494.473	89,87			
Capaian Rata-Rata						100,00	31.029.143.598	27.886.494.473	89,87			
8	Meningkatnya layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	persen	60,00	60,00	100,00	755.219.400	688.060.410	91,11			
	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	orang	35.00	25.00	71,43	154.475.000	119.742.700	77,52			
	Tersedianya informasi jasa kons tingkat kabupaten	Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten	dokumen	1.00	1.00	100.00	28.803.000	16.520.835	69,41			
	Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi	laporan	2.00	2.00	100.00	576.941.400	551.796.875	95,64			
Capaian Rata-Rata						90,47	755.219.400	688.060.410	91,11			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Terselenggaranya penataan ruang wilayah kabupaten	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	100.00	92.09	92.09	318.770.000	293.079.556	91,94			
	Ditetapkannya dokumen RTRW da RDTR kabupaten	Dokumen tata ruang	Dokumen	5.00	1.00	20.00	65.000.000	39.768.556	61,18			
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten	Dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	2.00	2.00	100.00	200.000.000	199.541.000	99,77			
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	5.00	2.00	40.00	49.330.000	49.330.000	100.00			
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Laporan Evaluasi	Dokumen	1.00	1.00	100.00	4.440.000	4.440.000	100.00			
Capaian Rata-Rata						65.00	318.770.000	293.079.556	91,94			
10	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	Persen	100.00	0.00	0.00	83.946.803	0	0.00			
	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Rumah layak huni bagi korban bencana	unit	2.00	0.00	0.00	83.946.803	0	0.00			
Capaian Rata-Rata						0.00	83.946.803	0	0.00			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Tertanganinya tumbuh kembang kawasan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Persen	99.80	99.93	100.13	608.817.000	605.084.000	99,39			
	Rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh	Luasan rumah layak huni yang diperbaiki	M2	540.00	240.00	44,44	608.817.000	605.084.000	99,39			
Capaian Rata-Rata						44,44	608.817.000	605.084.000	99,39			
12	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kota dan kawasan permukiman	Persentase PSU yang dikelola	Persen	66.00	48,42	73,34	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32			
	Terselenggaranya penyediaan PSU perumahan	Persentase penanganan PSU	persen	100.00	100.00	100.00	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32			
Capaian Rata-Rata						100.00	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32			

LAMPIRAN II
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik / (Turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	persen	78,67	77,21	Naik	104,89	102,95	Naik	75,00	104,89
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
1.1	Terselenggaranya proses perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9,00	9,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	9,00	100,00
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	3,00	3,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	3,00	100,00
1.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	50,00	50,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	50,00	100,00
1.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
1.5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
1.6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	6,00	6,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	6,00	100,00

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik / (Turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	persen	48,44	48,02	Naik	97,05	106,47	Turun	52,82	91,71
2.1	Terkelolanya sumber day air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder	persentase SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dikelola	persen	97,29	100,00	Turun	97,29	100,00	Turun	100,00	97,29
2.2	Terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi	Persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) daerah kabupaten / kota yang dikelola dengan Baik	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
3	Terlaksana-nya Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	persen	18,65	-	-	101,91	-	-	19,75	94,43
3.1	Terselenggara-nya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baik	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
4	Terlaksana-nya Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	persen	7,69	-	-	93,78	-	-	8,69	88,49
4.1	Terselenggaranya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang dikelola dengan baik	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik / (Turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Terlaksana-nya Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	21,54	23,04	Turun	97,91	104,02	Turun	29,59	72,79
5.1	Terselenggara-nya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Panjang saluran drainase lingkungan	persen	1.046	620	Naik	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
6	Tertatanya bangunan gedung di kabupaten	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar	persen	4,58	-	-	95,62	-	-	5,22	87,74
6.1	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	persen	100,00	100,00		100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00
7	Meningkat-nya jalan standar kabupaten	Persentase jalan standar kabupaten	persen	27,50	-	-	97,35	-	-	29,00	94,85
7.1	Terselenggara-nya pengelolaan jalan kabupaten	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik / (Turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Meningkat-nya layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	persen	60,00	90,00	Turun	100,00	150,00	Turun	60,00	100,00
8.1	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	persen	25,00	35,00	Turun	100,00	100,00	Tetap	35,00	71,43
8.2	Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Dok	1,00	-	-	100,00	-	-	1,00	100,00
8.1	Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi	Paket Pekerjaan	2,00	1,00	Naik	100,00	100,00	Tetap	2,00	100,00
9	Terselenggaranya penataan ruang wilayah kabupaten	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	persen	92,09	97,26	Turun	92,09	97,26	Turun	100,00	92,09
9.1	Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten	Dokumen tata ruang	Dok	1,00	2,00	Turun	20,00	100,00	Turun	5,00	20,00
9.2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten	Dokumen perencanaan tata ruang	Dok	2,00	1,00	Naik	100,00	100,00	Tetap	2,00	100,00
9.3	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Dok	2,00	2,00	Tetap	40,00	100,00	Turun	1,00	200,00
9.4	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Dok	1,00	1,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	1,00	100,00

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik / (Turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	Persen	0	0	Tetap	0	0	Tetap	100,00	-
10.1	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Rumah layak huni bagi korban bencana	Unit	0	0	Tetap	0	0	Tetap	2,00	-
11	Tertangani-nya tumbuh kembang kawasan pemukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	Persen	99,93	99,80	Naik	100,00	100,00	Tetap	99,82	100,00
11.1	Rumah tidak layak huni (RTLH) di diluar kawasan kumuh	Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	M2	240,00	480,00	Turun	133,33	100,00	Naik	600,00	40,00
12	Meningkat-nya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kota dan kawasan permukiman	Persentase PSU yang dikelola	Persen	48,42	47,00	Naik	73,34	71,29	Naik	69,84	69,33
12.1	Terselenggara-nya penyediaan PSU perumahan	Persentase penanganan PSU	persen	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00	Tetap	100,00	100,00

LAMPIRAN III
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM			
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	101,22	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	persen	100,00	100,00	100,00												
			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	persen	75,00	78,67	104,89												
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah	persen	100,00	100,00	100,00												
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100,00	100,00	100,00												
		100,00	Terselenggara- nya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9,00	9,00	100,00	12.509.400	9.804.050	78,37				√				
		100,00	Terselenggara- nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	3,00	3,00	100,00	10.506.403.978	7.907.438.684	75,26				√				
		100,00	Terselenggara- nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	50,00	50,00	100,00	100.000.000	64.622.375	64,62								

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	100,00	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	896.606.563	848.320.665	94,61				√			
	100,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100,00	100,00	100,00	327.112.800	305.854.785	93,50				√			
	100,00	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	6,00	6,00	100,00	263.368.900	261.121.850	99,15				√			
Jumlah SK-KP 1							100,00	12.106.001.641	9.397.162.409	77,62							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	97,05	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	persen	49,91	48,44	97,05										
		97,29	Terkelolanya sumber daya air dan bangunan pengaman pantai, sungai, dan drainase sekunder	persen	100	97,29	97,29	1.431.480.807	1.298.227.700	90,69				√			
		100	Terkelolanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi	persen	100	100	100	778.962.079	777.501.000	99,81				√			
Jumlah SK-KP 2							98,65	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	101,91	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	persen	18,30	18,65	101,91										
		100,00	Terselenggaranya sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16				√			
Jumlah SK-KP 3							100,00	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Terlaksana- nya Pengelolaan dan Pengembang- an sistem air limbah	93,78	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	persen	8,2	7,69	93,78										
		100,00	Terselenggarany- a sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /kota yang dikelola dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90				√			
Jumlah SK-KP 4							100	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Terlaksana- nya Pengelolaan dan Pengembang an sistem drainase	97,91	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	22,00	21,54	97,91										
		100,00	Terselenggara- nya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Panjang saluran drainase lingkungan	persen	1.046	1.046	100,00	694.710.000	693.614.500	99,84				√		
Jumlah SK-KP 5							100,00	694.710.000	693.614.500	99,90							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Tertatanya bangunan gedung di kabupaten	95,62	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar	persen	4,79	4,58	95,62										
		100,00	Terselenggaranya a bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin memirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	persen	100,00	100,00	100,00	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37				√			
Jumlah SK-KP 6							100,00	13.474.485.000	12.984.741.300	96,37							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Meningkat- nya jalan standar kabupaten	97,35	Persentase jalan standar kabupaten	persen	28,25	27,50	97,35										
		100,00	Terselenggara- nya pengelolaan jalan kabupaten	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	31.029.143.598	27.886.494.473	89,87			√			
Jumlah SK-KP 7							100,00	31.029.143.598	27.886.494.473	89,87							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Meningkatnya layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	100,00	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	persen	60,00	60,00	100,00										
		100,00	Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi di kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	persen	25,00	25,00	100,00	154.475.000	119.742.700	77,52				√		
		100,00	Tersedianya informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Ketersediaan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	Do	1,00	1,00	100,00	23.803.000	16.520.835	69,41				√		
		100,00	Terselenggaranya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan hasil ketaatan peraturan jasa konstruksi	Paket Pekerja an	1,00	1,00	100,00	576.941.400	551.796.875	95,64				√		
Jumlah SK-KP 8							100,00	755.2193.400	688.060.410	91,11							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Terselenggara nya penataan ruang wilayah kabupaten	92,09	Persentase penyelenggara an penataan ruang		persen	100,00	92,09	92,09										
		20,00	Ditetapkannya dokumen RTRW dan RDTR kabupaten	Dokumen tata ruang	Dok	5,00	1,00	20,00	65.000.000	39.768.556	41,99					√		
		100,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten	Dokumen perencanaan tata ruang	Dok	2,00	2,00	100,00	23.803.000	199.541.000	99,77				√			
		40,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Dok	5,00	2,00	40,00	576.941.400	49.330.000	100,00					√		
		100,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Dok	1,00	1,00	100,00		4.440.000	100,00				√			
Jumlah SK-KP 9								65,00	755.2193.400	688.060.410	91,94							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	0,00	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana		persen	100,00	0,00	0,00										
		0,00	Tersedianya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Rumah layak huni bagi korban bencana	Unit	1,00	0,00	00,00	83.946.803	0,00	0,00							
Jumlah SK-KP 10								00,00	83.946.803	0,00	0,00							

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Tertangani-nya tumbuh kembang kawasan pemukiman kumuh diluar kawasan kumuh	100,00	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh		persen	99,80	99,93	100,13									
		133,33	Rumah tidak layak huni (RTLH) di diluar kawasan kumuh	Luasan rumah tidak layak huni yang diperbaiki	M2	180,00	240,00	133,33	608.817.000	605.084.000	99,39				√		
Jumlah SK-KP 11								133,33	608.817.000	605.084.000	99,39						

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Meningkat- nya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kota dan kawasan permukiman	73,34	Persentase PSU yang dikelola		persen	66,02	48,42	73,34										
		100,00	Terselenggara- nya penyediaan PSU perumahan	Persentase penanganan PSU	persen	100,00	100,00	100,00	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32				√			
Jumlah SK-KP 12								100,00	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32							

LAMPIRAN IV
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis		Kinerja IKU				Anggaran			Efisiensi Sumber Daya		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an dan permukiman	persen	45,34	45,35	100,02	73.827.217.328	66.852.551.674	90,55	√	
2	Meningkatnya infrastruktur kePUan	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	persen	26,17	25,57	97,71	66.758.769.875	60.042.683.638	89,94	√	
3	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU permukiman	persen	64,52	65,14	100,96	7.068.447.453	6.809.868.036	96,34	√	

